



DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

CIMAHI
Campernik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

Drs. ACHMAD NURYANA i

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

1.1 LATAR BELAKANG..... 2

1.2 DASAR HUKUM..... 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN KINERJA..... 6

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS.. 6

KEBUDAYAANPARIWISATA KEPEMUDAAN DAN 6

OLAHRAGA 6

1.5 SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN..... 8

PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA 8

CIMAHI 8

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN..... 9

BAB II 10

PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 RENCANA STRATEGIS 10

2.2 VISI DAN MISI 13

2.3 PERJANJIAN KINERJA..... 13

BAB III 22

AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1 Akuntabilitas Kinerja..... 22

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 22

3.2 REALISASI ANGGARAN 45

BAB IV..... 48

PENUTUP..... 48

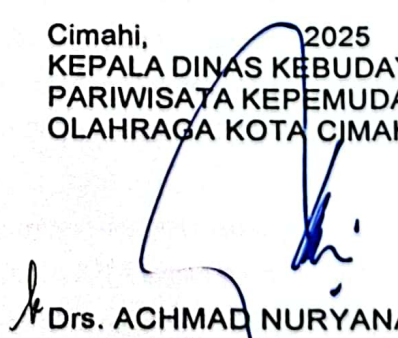
KATA PENGANTAR

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/ Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2024 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan OPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sebagaimana telah direncanakan dalam RENJA OPD dan DPA OPD Tahun 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Dinas Kebudayaan pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Cimahi, 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA CIMAHI


Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi.

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

LKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan dalam pembuatan LKIP instansi Pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. secara internal LKIP ini merupakan salah satu instrument bagi kita untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja perangkat daerah serta unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah oleh sebab itu kita semua dituntut untuk berlomba dan

memahami model serta bentuk format laporan tersebut termasuk data apa saja yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan tersebut agar mendapat penilaian yang lebih baik lagi.

Pada era keterbukaan informasi publik yang berlaku saat ini diperlukan keterbukaan kepada publik (masyarakat) tentang apa yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku pelayan dan pengayom bagi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu system pelaporan yang dapat menyampaikan tentang pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat secara sistematis dan akuntabel.

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pemerintahan, menjadi saran evaluasi dari keberhasilan/kegagalan sebelumnya, menghindari kemungkinan mengulangi kegagalan dan tetap memboroskan sumber – sumber daya. Karena dengan adanya Laporan kinerja diharapkan dapat

menjadi acuan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi, umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, meningkatkan perencanaan di segala bidang (baik program maupun sumber daya instansi), meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan

secara baik, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Tahun 2024 ini ekonomi dah mulai bangkit walaupun belum sepenuhnya pulih kembali. Segiatan kegiatan yang mengundang orang banyak dah banyak dilakukan dimana mana seperti konser, pagelaran kebudayaan, dan sebagainya.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2024, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
- g. Perwal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Cimahi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas.

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Berdasarkan Perda No 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya banyak masalah masalah yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya SDM dan kompetensi dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan,
3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi,
4. Masih kurangnya dukungan dari stakeholder terkait terhadap Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga.

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi.

Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Olahraga, maka dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Cimahi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Isu strategi Kota Cimahi di bidang Kebudayaan, Pariwisata kepemudaan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Sadar Wisata di masyarakat dan Pengembangan Ekraf
2. Masih rendahnya Pemajuan kebudayaan di Kota Cimahi,
3. Belum optimalnya tingkat partisipasi dalam Pembangunan
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Olah raga milik Pemerintah, rendahnya prestasi olahraga dan angka partisipasi masyarakat

untuk olahraga.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

- Menyelenggarakan festival seni budaya,
- Membuka destinasi wisata baru,
- Pemeliharaan sarana dan Prasarana olahraga yang dimiliki Oleh Pemkot Cimahi,
- Menjaring kerjasama dengan instansi militer di Kota Cimahi dalam rangka pengembangan wisata heritage militer.
- Menggerakan pemuda melalui organisasi Kepemudaan.
- Menyediakan dan sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan bagi pemuda.

1.5 SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

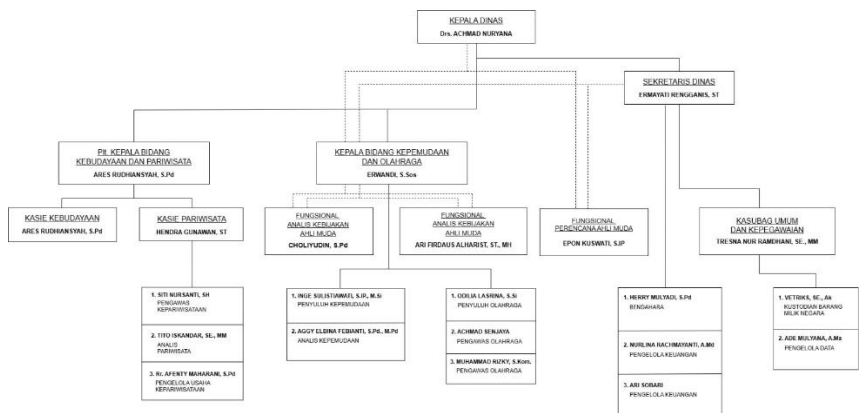
Dalam menjalankan organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Perwal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Cimahi

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Cimahi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 1. Seksi Kebudayaan; dan
 2. Seksi Pariwisata.
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2024, sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Dasar Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja
- 1.4.Permasalahan dan Isu-isu StrategisDinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- 1.5.Susunan Organisasi Dinas Kebudayaa PariwisataKepemudaan
dan Olahraga Kota Cimahi
- 1.6.Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1.Rencana Strategis
- 2.2.Visi dan Misi
- 2.3.Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS

- 3.1.Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3.Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misidiharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturanperundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 109 disebutkan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dan pada pasal 58 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Renstra SKPD harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasilguna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan RPD tersebut, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menyusun Rencana Strategis 2023-2026, yang memuat panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tahun 2023 disusun RPD Kota Cimahi 2023-2026, maka dari itu Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga disusun baru sesuai dengan RPD 2023-2026.

2.2 VISI DAN MISI

Visi Dalam RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah “Cimahi Kota Cerdas”. Adapun misi nya adalah sbb :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat,,
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Daerah yang berkeadilan,
3. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya saing lingkungan,
4. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah raga berada di misi 1 dan Misi 3 .

Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah :

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
4. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi,
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan
6. Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan,
7. Meningkatkan Ketahanan bencana.

Tupoksi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga termasuk pada kegiatan No. 3, 4 dan 5

2.3 PERJANJIAN KINERJA

RENSTRA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD 2023-2026 yang terdapat pada Misi ke 1 (satu) dan Misi 3 (Tiga) yaitu : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan. Ada 7 Indikator Kinerja Utama Kota

Cimahi tahun 2023-2026, Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan olahraga masuk pada Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi, dan Meningkatkan tatakelola pemerintahan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun Kedua dari Renstra Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023- 2026, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga.

Anggaran Murni tahun 2024 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah Rp 36.545.729.571, yang didalamnya terdapat Hibah untuk Koni Rp 4.000.000.000, NPCI Rp. 750.000.000, Pramuka Rp. 400.000.000 , KORMI Rp. 500.000.000. sesuai amanat Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hibah termasuk kedalam anggaran di Dinas. Kemudian pada Anggaran Perubahan Anggaran menjadi Rp 28.780.443.536; karena ada pengurangan dari untuk Pemeliharaan GOR Sangkuriang, Pembelian tanah Cibodas, Pembangunan Imah Seni, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pembangunan Lapangan Cibaligo dan ada pengalihan dari kegiatan satu kekegiatan lainnya. Tanpa mengurangi target kinerja Dinas.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan olahraga dibuat sesuai dengan dokumen
Renstra tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	
MISI 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Yang Berbasih Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientai Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi Dan Industri KecilMenengahdalam Upaya Pengentasan Kemiskinan				
1	Meningkatnya Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) 2) Jumlah KunjunganWisat awanNusantara (Wisnus) 3) Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	1) 450 2)158.000 3) 2 Hari satu malam
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahdalam pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan				
2	Mengemban gkan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kreatif dan Budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan	64%
3	Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	9,01%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	47%
5	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai RB	74,97

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Pada Tahun Anggaran 2024 untuk memenuhi Indikator Kinerja
Utama Kepala Dinas melakukan beberapa kegiatan strategis

Seperti Cimahi menari, Penataan Eco Wisata Cimahi, Pembangunan Mini Soccer di Cibaligo, dan Cimahi Creative Day.

Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 11 program dan 21 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan untuk dua Bidang dan satu sekretariat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 28. 790.443.536. Rincian anggaran perkegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	353.911.378
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.362.628
	Koordinasi dan Penyusnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.910.100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.638.650
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.195.834.208
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.015.002.130
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.515.378
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.922.250
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.394.450
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	59.856.614
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.749.850
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.106.764
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	136.114.700
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	136.114.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.019.700

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.589.700
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.430.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	650.030.300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.734.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.716.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.989.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.549.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.694.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.748.000
	Pengadaann Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.167.000
	Pengadaan Mebel	23.374.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.793.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.634.450
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.999.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.999.800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.634.850
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.947.516
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.350.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.924.016

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.130.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.178.543.500
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	230.520.600
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	48.631.850
		Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	83.580.000
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	98.308.750
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.048.678
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	512.048.678
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.241.932.900
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.241.932.900
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.722.656.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	258.150.000
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	5.464.506.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	720.713.000
		Seleksi Atlet Daerah	146.064.000
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	195.860.000

	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	331.559.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Infomasi Sektoral Olahraga	47.230.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	115.800.000
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	115.800.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.105.610.728
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	605.610.728
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.103.923.714
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	590.166.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	513.757.714
	Pelestariaan Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.017.421.050
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya	708.756.050
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	89.750.000
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	218.915.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		228.765.000
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	101.780.000
		Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	91.360.000
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	35.625.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		242.200.000
		Penetapan Cagar Budaya	242.200.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		193.860.000
		Pelindungan Cagar Budaya	193.860.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/Kota		3.966.220.500
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.972.544.000
		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	589.308.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.404.368.500
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota		136.623.300
		Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	136.623.300

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Desnitasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	586.110.900
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	32.687.900
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	321.219.000
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	232.204.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	68.095.000
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	68.095.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	953.426.300
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	199.710.000
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	725.158.500
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	28.557.800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Cimahi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	>100%	Melebihi/melampaui target (baik sekali)
2	76%- 100%	Sesuai target (Baik)
3	55% - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4	< 55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (Enam) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 3 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;

- 4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator;
- 5. Sasaran 5, terdiri dari 1 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan olahraga menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026.

3.1.1 Sasaran Strategis : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata”
Indikator :Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA SERTA CAPAIAN KINERJA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



Kota Cimahi menjadi tujuan wisata yang berdaya saing menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan Kota Cimahi menjadi tujuan wisata yang berdaya saing yang bisa memberikan kontribusi PAD pada sektor pariwisata. Adapun capaian Jumlah

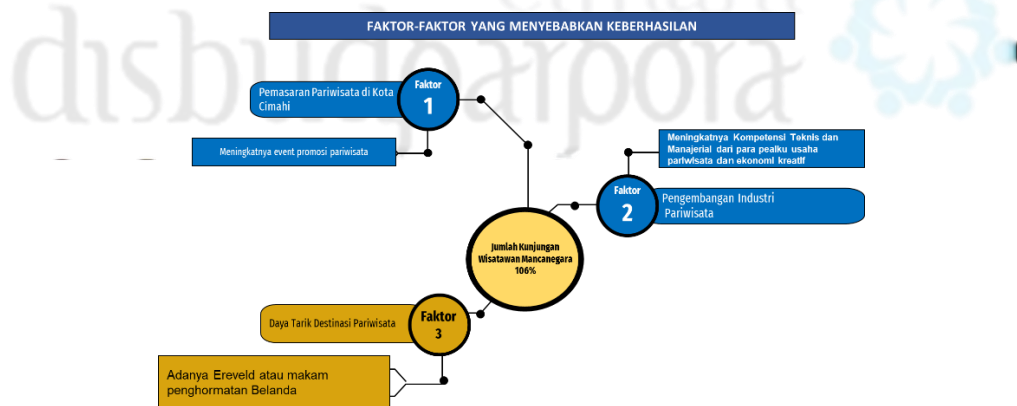
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 106% dari target sebesar 450 Kunjungan dan terealisasi sebesar 477 Kunjungan.

Dari segi realisasi, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara meningkat 51 Kunjungan atau 106% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 426 Kunjungan sedangkan tahun 2024 sebesar 477 Kunjungan. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara menurun sebesar -1314% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1420%, itu dikarenakan ada perubahan target di Renja Perubahan yang awalnya 30 Menjadi 450 sehingga kalau dibandingkan dengan kenaikan tahun 2023 capaian pasti akan menurun karena target dinaikkan.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Cimahi tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 795% dari target Renstra sebesar 60 Kunjungan dan terealisasi 477 kunjungan pada tahun 2024.

Di Provinsi Jawa Barat Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2024 sebanyak 1.242.748 dengan rata rata 46.028. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Cimahi bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Jawa Barat hanya 1.04%.

Faktor- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:



Berdasarkan gambar di atas, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh meningkatnya pemasaran pariwisata di Kota Cimahi. Pemasaran Pariwisata dilakukan melalui Media online seperti Instagram, Youtube Channel, Web Dinas serta melalui Cetak buku dan Brosur.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata. Hal ini dapat dilihat melalui penyelenggaraan pelatihan pelatihan oleh Dinas, Penyelenggaraan event event seperti Cimahi Creative Day, Cimahi Menari, Cireundeu Festival serta Pembentukan Komite Ekraf.

Faktor Keberhasilan ketiga adalah adanya Ereveld atau makam penghormatan Belanda, dengan adanya ereverld ini banyak warga negara Belanda yang datang ke Cimahi untuk mengenang nenek moyangnya..



Untuk mengakselerasi kinerja kunjung pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 460 menjadi lebih besar dari 477. Hal ini didorong juga oleh realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2024 sebesar 477 kunjungan sudah melampaui target Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2025 sebesar 460.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan

Mancanegara meliputi: sasarannya cascading 2025, indikator dan angka 2024

- 1. Promosi Pariwisata di Pasar Mancanegara dan Nusantara
 - 2. Pembinaan Pelaku Ekomomi Kreatif di bidang industri pariwisata
- Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Cimahi dukung oleh 2 program diantaranya adalah Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	106%	93,38%	12,62%

Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara 106% sementara penyerapan anggaran di angka 93,38% ,aka efisiensi terhadap anggaran sebesar 12,62%.

3.1.2 Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata”

Indikator: Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA SERTA CAPAIAN KINERJA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



Kota Cimahi ingin menjadi tujuan wisata yang berdaya saing dengan menunjukan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan Kota

Cimahi menjadi tujuan wisata yang berdaya saing yang bisa memberikan kontribusi PAD pada sektor pariwisata. Adapun capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 108,01% dari target sebesar 158.000 Kunjungan dan terealisasi sebesar 170.661 Kunjungan.

Dari segi realisasi, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara meningkat 13.234 Kunjungan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 157.427 Kunjungan dan tahun 2024 sebesar 170.661 Kunjungan. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara menurun sebesar -275,96% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 383,987% dan pada tahun 2024 sebesar 108,01% itu dikarenakan ada perubahan target di Renja Perubahan yang awalnya 43.050 menjadi 158.000 sehingga kalau dibandingkan tahun 2023 capaian kinerjanya menurun karena target dinaikan.

Di Provinsi Jawa Barat Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2024 sebanyak 88.178.729 dengan rata rata 3.265.879. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di Kota Cimahi bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di Provinsi Jawa Barat hanya 5,21%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Cimahi tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 359,57% dari target Renstra sebesar 47.462 Kunjungan dan terealisasi 170.661 kunjungan pada tahun 2024.



Berdasarkan gambar di atas, jumlah kunjungan wisatawan nusantara dipengaruhi oleh meningkatnya daya tarik pariwisata di Kota

Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari daya tarik wisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yaitu Ecowisata Cimahi dan Cireudeu. Selain itu tempat wisata yang ada sebelumnya pengelolaannya lebih baik sehingga pengunjung senang datang ke tempat wisata. .

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dikarenakan ada kegiatan Pemasaran Pariwisata. Pemasaran Pariwisata merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menaikkan jumlah kunjungan wisatawan. Pemasaran Pariwisata sekarang ini banyak dilakukan melalui elektronik seperti Instagram, Web dan channel Youtube. Adapun cetakan tetap dilakukan untuk dibagikan ketika pameran ataupun untuk tamu yang datang ke Kota Cimahi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kunjungan wisatawan dipengaruhi juga oleh layanan ketika berwisata, misalnya pelaku pariwisata yang informatif, tempat wisata yang ramah anak dan orang tua, pelaku pariwisata yang mempunyai kemampuan lebih dan sarana prasarana di tempat wisata. Untuk itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan pembinaan kepada para pelaku pariwisata dan pemilik tempat wisata.



Untuk mengakselerasi kinerja kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 159.000 menjadi lebih besar dari 170.184. Hal ini didorong juga oleh realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2024 sebesar 170.184 kunjungan sudah melampaui target Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2025 sebesar 159.000.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara ke Cimahi adalah sebagai berikut

1. Pembelian lahan untuk Parkir di Ecowisata Cimahi,
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola dan Pelaku Pariwisata Kota Cimahi
3. Pengadaan event Pariwisata,
4. Pemasaran Pariwisata,
5. Pemeliharaan Tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kota Cimahi dukung oleh 3 program diantaranya adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	107,71%	92,37%	15,34%

Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara sebesar 107,07% sementara penyerapan anggaran di angka 92,37% , maka efisiensi terhadap anggaran sebesar 15,34%.

3.1.3 Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata”

Indikator: Length of Stay (Lama Kunjungan Wisata)

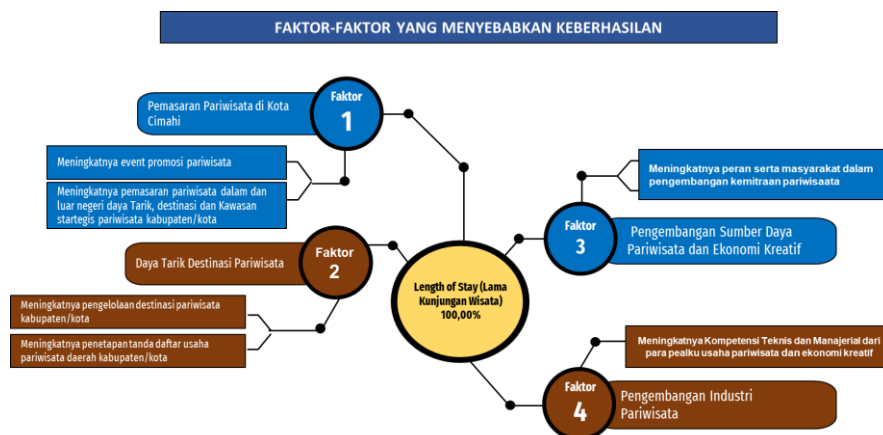
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA



Kota Cimahi menjadi tujuan wisata yang berdaya saing menunjukan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan Kota Cimahi menjadi tujuan wisata yang berdaya saing yang bisa memberikan kontribusi PAD pada sektor pariwisata. Adapun Length Of Stay (Lama Kunjungan Wisata) Wisatawan ke Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 2 Hari 1 Malam dan terealisasi sebesar 2 Hari 1 Malam.

Dari segi realisasi, Length Of Stay (Lama Kunjungan Wisata) Wisatawan tetap dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 2 Hari 1 Malam dan tahun 2024 sebesar 2 Hari 1 Malam. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Lama Kunjungan (Length of Stay) Wisatawan tetap sebesar 0,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,00% dan pada tahun 2024 sebesar 100%

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Length Of Stay (Lama Kunjungan Wisata) tahun 2024 sesuai target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra 2 Hari 1 Malam Kunjungan dan terealisasi 2 Hari 1 Malam pada tahun 2024.



Berdasarkan gambar di atas, Length of Stay (Lama Kunjungan Wisata) dipengaruhi oleh meningkatnya pemasaran pariwisata di Kota Cimahi. Promosi Pariwisata merupakan faktor yang penting dalam pencapaian length of stay karena dengan promosi yang menarik akan mengundang wisatawan datang untuk berkunjung dan menginap.

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi Length of Stay (Lama Kunjungan Wisata) meningkat, karena dengan pengembangan Daya tarik wisata ini wisatawan akan nyaman untuk berlama lama di Kota Cimahi

Selanjutnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Industri Pariwisata menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Length of Stay (Lama Kunjungan Wisata) karena 17 subsektor ekraf berpeluang mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Cimahi seperti pengembangan animasi, Fashion, dan Kuliner.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Length of Stay (Lama Kunjungan Wisata) meliputi: sasarannya cascading 2025, indikator dan angka 2024

1. Pembelian lahan untuk Parkir di Ecowisata Cimahi,
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola dan Pelaku Pariwisata Kota Cimahi
3. Pengadaan event Pariwisata,
4. Pemasaran Pariwisata,
5. Pemeliharaan Tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Capaian Length Of Stay (Lama Tinggal) di Kota Cimahi dukung oleh 3 program diantaranya adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

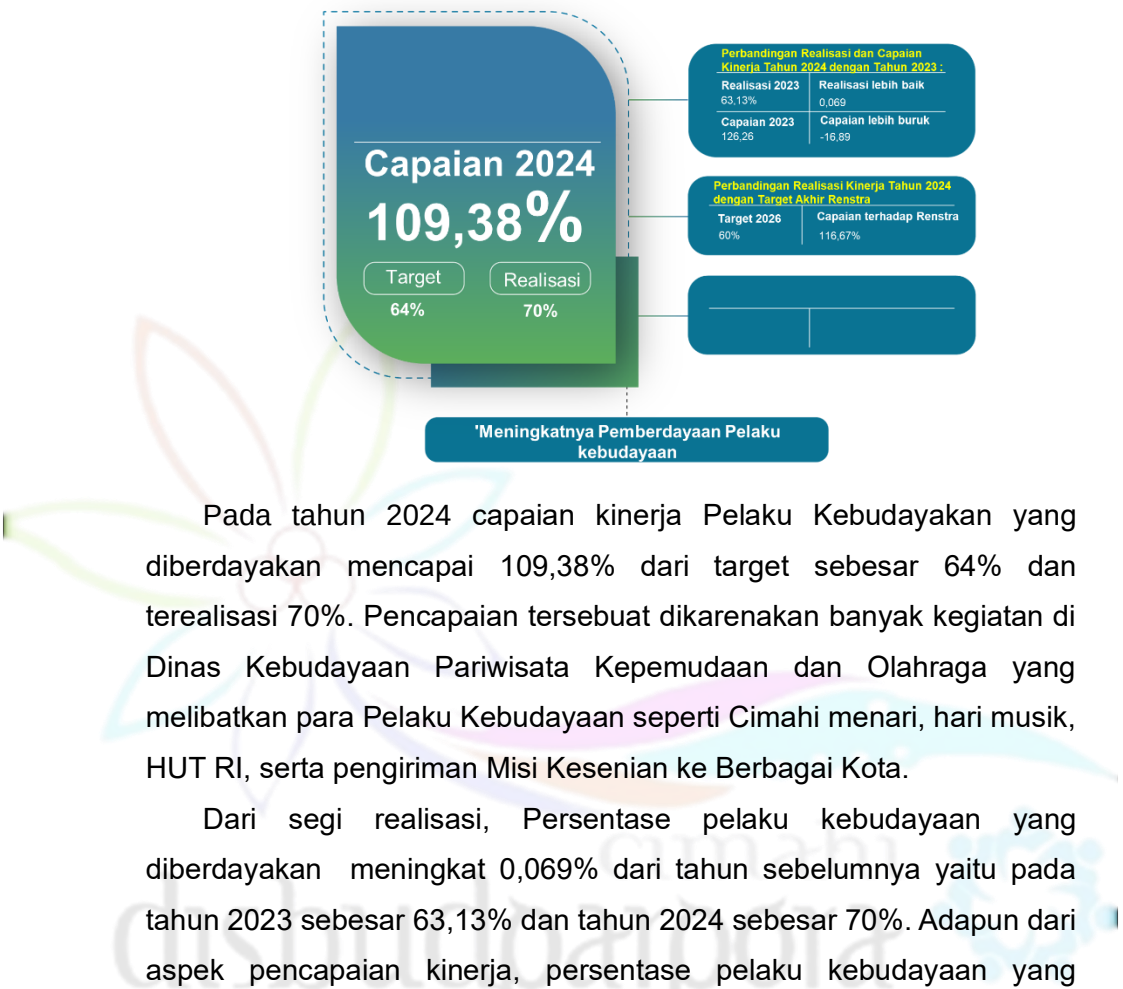
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	100%	90,95%	9,05%

Capaian Kinerja Length Of Stay 100% sementara penyerapan anggaran di angka 90,95% ,maka efisiensi terhadap anggaran sebesar 9,05%.

3.1.4 Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan”

Indikator: Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan

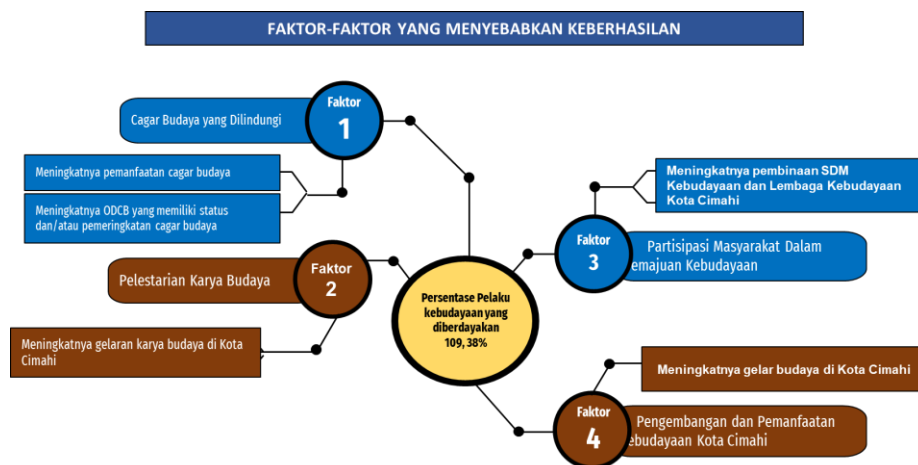
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA



Pada tahun 2024 capaian kinerja Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan mencapai 109,38% dari target sebesar 64% dan terealisasi 70%. Pencapaian tersebut dikarenakan banyak kegiatan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang melibatkan para Pelaku Kebudayaan seperti Cimahi menari, hari musik, HUT RI, serta pengiriman Misi Kesenian ke Berbagai Kota.

Dari segi realisasi, Persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan meningkat 0,069% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 63,13% dan tahun 2024 sebesar 70%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan menurun sebesar -16,89% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 126,26% dan pada tahun 2024 sebesar 109,38%. Seperti Ketiga IKU sebelumnya dikarenakan ada penyesuaian/Perubahan Target IKU di Renja Perubahan 2024, yang awalnya 60% menjadi 64%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 116,67% dari target Renstra sebesar 60% dan terealisasi 70% pada tahun 2024.



Berdasarkan gambar di atas, prosentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan dipengaruhi oleh meningkatnya cagar budaya yang dilindungi di Kota Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari prosentase cagar budaya yang dilestarikan sebesar 36%. Tim Ahli Cagar Budaya yang menilai bangunan tersebut layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya merupakan para pelaku Kebudayaan di Kota Cimahi yang tahun 2024 menetapkan 3 Cagar Budaya melalui SK Walikota Cimahi yaitu Rumah Potong Hewan, SMPN 2 dan Gerbang Kerkof.

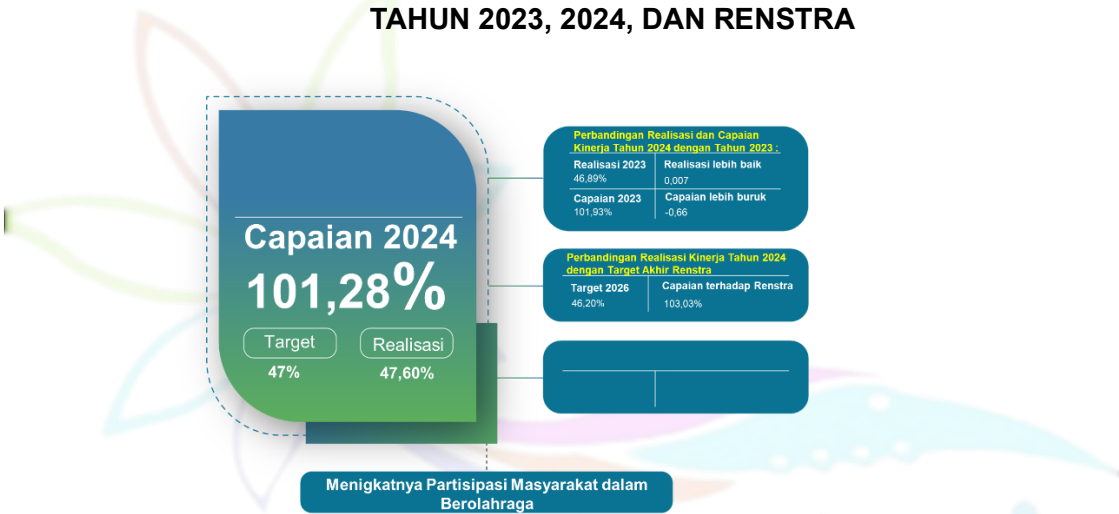
Pelestarian karya budaya menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi prosentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan meningkat. Tahun 2024 Kebudayaan yang ditampilkan kedepan Publik oleh Pemkot Cimahi adalah Angkung Buncis, Bangbarongan Munding Dongkol dan seni Durcing yang merupakan 3 dari 20 seni buhun yang ada di Kota Cimahi Cimahi. Seni Buhun ini merupakan Kesenian yang harus Kita lestarikan, untuk itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berkomitmen untuk selalu menampilkan setiap tahun secara bergantian

Selanjutnya Partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Prosentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan meningkat, hal ini dapat diliat dengan tinggi nya partisipasi masyarakat didalam mengikuti berbagai kejuaraan ataupun even event yang diselenggarakan oleh Disbudparpora maupun DKKC. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 membuat event Kebudayaan dengan banyak melibatkan masyarakat sehingga capaian kebudayaan yang dikembangkan mencapai 50% sesuai dengan target yang diinginkan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Prosentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan meningkat, yaitu dengan melakukan banyak pageran kesenian dan kejuaraan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga yang bekerjasama dengan DKKC serta menyelenggarakan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia Kesenian tradisional sehingga capaian Kesenian tradisional yang dikembangkan mencapai 50%.

3.1.5 Sasaran Strategis 5 : “Meningkatnya Partidipasi Masyarakat dalamBerolahraga”
Indikator: Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga”

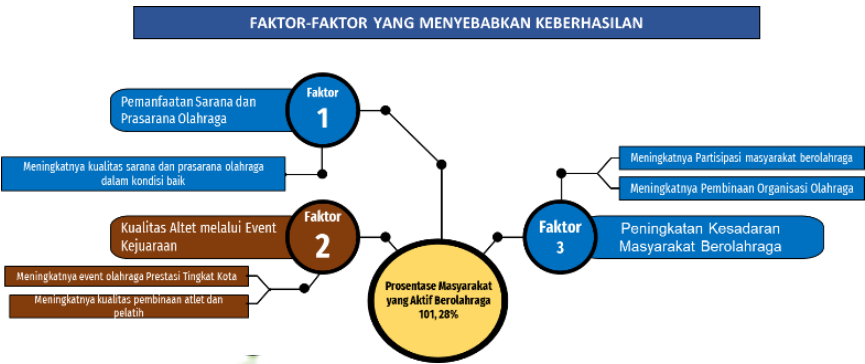
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA



Perkembangan aktivitas olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Pemasyarakatan olahraga di kota Cimahi melalui peningkatan jumlah event olahraga sekaligus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berolahraga minimal 1 kali seminggu. Angka partisipasi masyarakat berolahraga dihitung berdasar APMO tahunan (Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga). Adapun capaian Persentase masyarakat yang aktif berolahraga pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 101,28% dari target sebesar 47% dan terealisasi 47,60%.

Dari segi realisasi, Prosentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga meningkat 0,007% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 46,89% dan tahun 2024 sebesar 47,60%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Prosentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga menurun sebesar -0,66% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101,93% dan pada tahun 2024 sebesar 101,28%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 103,03% dari target Renstra sebesar 46,20% dan terealisasi 47,60% pada tahun 2024.



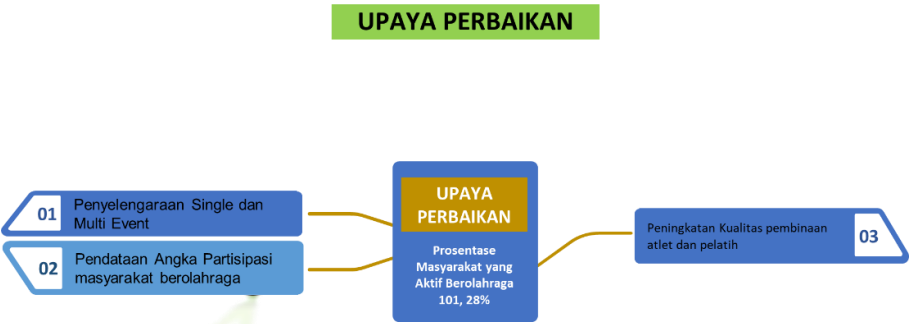
Berdasarkan gambar di atas, prosentase masyarakat yang aktif berolahraga dipengaruhi oleh Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Cimahi. Membangun dan memperbaiki dan memelihara sarana prasarana olah raga di Kota Cimahi menjadi tupoksi Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan Olahraga telah dilakukan dengan baik. Tahun 2024 telah dibangun 1 lapang Mini Soccer di Cibaligo Kelurahan Padasuka, melakukan perbaikan di Gor Sangkuriang dan memelihara Stadion Sangkuriang. Sehingga capaian Kinerja Sarana Prasarana yang baik dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi mencapai 75%.

Selanjutnya kualitas atlet melalui event kejuaraan menjadi faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga di Kota Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari prosentase sumberdaya olahraga yang terbina sebesar 55%. Kondisi pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya event olahraga prestasi tingkat kota dan meningkatnya kualitas pembinaan atlet dan pelatih melalui upaya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan sebanyak 400 orang dan jumlah atlet yang diseleksi sebanyak 300 orang.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga adalah peningkatan kesadaran masyarakat berolahraga. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga dan pembinaan organisasi olahraga melalui upaya jumlah penyelenggaraan, pengembangan, dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi sebanyak 3 kegiatan dan jumlah

pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi sebanyak 1 kegiatan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Prosentase masyarakat berolahraga tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Masyarakat yang Aktif dalam Berolahraga meliputi:

- 1. Penyelenggaraan single dan multi event
- 2. Pendataan Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga
- 3. Peningkatan Kualitas Pembinaan Atlet dan Pelatih

Meningkatnya Prosentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga di Kota Cimahi dukung oleh 1 program diantaranya adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	101,28%	92,13%	9,15%

Capaian Kinerja Prosentase Masyarakat berolahraga sebesar 101,28% sementara penyerapan anggaran di angka 92,13% ,maka efisiensi terhadap anggaran sebesar 9,15%.

3.1.4 Sasaran Strategis 6 : “Meningkatnya Partisipasi Pemuda DalamPembangunan”

Indikator: ”Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan”

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA



Partisipasi pemuda dalam pembangunan dihitung dari Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang aktif didalam berorganisasi dibagi dengan jumlah pemuda seKota Cimahi. Setelah dihitung prosentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 129,74% dari target sebesar 9,03% dan terealisasi 11,69%.

Dari segi realisasi, Prosentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan meningkat 0,027% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 8,98% dan tahun 2024 sebesar 11,69%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Prosentase Pemuda yang aktif dalam pembangunan meningkat sebesar 49,57% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 80,18% dan pada tahun 2024 sebesar 129,74%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 103,45% dari target Renstra sebesar 11,30% dan terealisasi 11,69% pada tahun 2024.



Berdasarkan gambar di atas, Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan dipengaruhi oleh organisasi pemuda yang aktif yaitu sebanyak 72% itu disebabkan juga oleh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga kerjasama dengan KNPI Kota Cimahi.

Setiap Tahun Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor ke Tingkat Nasional, Kota Cimahi setiap tahun juga menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor yang diambil dari 15 Kelurahan yang ada di Kota Cimahi yang nantinya akan di Kirim 5 orang ke Propinsi sesuai dengan kategori yang ada.

Setiap Tahun Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga menyelenggarakan pembinaan terhadap Wirausaha Muda, tahun ini yang dibina sebayak 50 orang yang nantinya para wirausaha muda ini akan berkompetisi di tingkat Kota yang nantinya akan dicari pemenangnya untuk mendapat uang pembinaan. Ini sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan adalah partisipasi pemuda dalam kepramukaan. Organisasi Kepramukaan setiap tahun mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kota untuk mengembangkan Organisasinya. Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan sebanyak 16.842 orang.



Untuk mengakselerasi kinerja Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 9,03% menjadi lebih besar dari 11,61%. Hal ini didorong juga oleh realisasi Prosentase Pemuda yang Aktif dalam Pembangunan tahun 2024 sebesar 11,61% sudah melampaui target Prosentase Pemuda yang Aktif Dalam Pembangunan 2025 sebesar 9,03%.



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan meliputi:

1. Klasifikasi sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Cimahi
2. Penyediaan data pemuda dan organisasi kepemudaan yang akan dibina di Kota Cimahi
3. Sosialisasi kegiatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)
4. Pembinaan anggota organisasi kepemudaan

Meningkatnya Prosentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan di Kota Cimahi dukung oleh 2 program diantaranya adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	128,86%	91,11%	37,75%

Capaian Kinerja Prosentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan sebesar 128,86% sementara penyerapan anggaran di angka 91,11% ,maka efisiensi terhadap anggaran sebesar 37,75%.

3.1.4 Sasaran Strategis 7 : “Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Publik”
Indikator: ”Nilai Reformasi Birokrasi”

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, 2024, DAN RENSTRA



Berdasarkan gambar diatas capaian Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 103,89% dari target sebesar 74,97% dan terealisasi 77,89%.

Dari segi realisasi, Nilai Reformasi Birokrasi meningkat 2.940% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 74,95 dan tahun 2024 sebesar 77,89%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Nilai Reformasi Birokrasi mengalami penurunan sebesar -46.01% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 149,90% dan pada tahun 2024 sebesar 103,89%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 149,90% dari target Renstra sebesar 50,4 dan terealisasi 77,89 pada tahun 2024.

Nilai RB Kota Cimahi 86,28 dan nilai RB Jawa Barat 98,64 jauh diatas Nilai RB Disbudparpora. Nilai yang dirasakan sangat kurang adalah di Digitalisasi Arsip (belum tertatanya arsip yang benar), Kualitas kebijakan Perangkat Daerah, Kualitas Produk Hukum (selama 2 tahun terakhir ini belum membuat Perda ataupun mengevaluasi Perda yang ada), dan Spam Lapor (belum ada aduan masyarakat yang masuk ke spam lapor). Perbedaan Nilai RB Disbudparpora dengan Kota Cimahi sebesar 8,39 dan dengan Nilai RB Provinsi Jawa Barat sebesar 20,75. Tapi kalau dengan target yang ingin dicapai Disbudparpora melebihi 100%a yaitu 103,89%



Berdasarkan gambar di atas, Nilai Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 82,30, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 96,83% dan Indeks Profesionalisme ASN sebesar 79,16. Kondisi pencapaian tersebut dipengaruhi pula oleh meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatnya kualitas peneglolaan keuangan perangkat

daerah, meningkatnya profesionalitas ASN perangkat daerah, meningkatnya kualitas pengelolaan arsip perangkat daerah, barang milik daerah yang memadai, dan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office dan komunikasi melalui upaya peningkatan jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 56 Dokumen, peningkatan jumlah ASN yang terlatih dan dibina sebanyak 22 Orang, peningkatan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket, peningkatan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor yang terpelihara sebanyak 20 Unit, dan peningkatan jumlah unit kerja yang terlayani sebanyak 1 unit.



Untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 75,00 Nilai menjadi lebih besar dari 77,89 . Hal ini didorong juga oleh realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 77,89 sudah melampaui target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 2025 sebesar 75,00.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Reformasi Birokrasi meliputi:

- 1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
- 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Informasi dan Kehumasan
- 3. Penyediaan Data Sarana dan Prasarana Olahraga, Objek Wisata
- 4. Penyusunan Data Realisasi Belanja Daerah yang selaras
- 5. Pembinaan Pegawai Disbudparpora
- 6. Pegawai mendapatkan Pelatihan
- 7. Fasilitasi Kinerja Pegawai
- 8. Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
- 9. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Nilai RB	103,89%	92,56%	11,33%

Capaian Kinerja Nilai RB Disbudparpora sebesar 103,89% sementara penyerapan anggaran di angka 92,56% ,maka efisiensi terhadap anggaran sebesar 11,33%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Belanja langsung dipergunakan pada 7 sasaran strategis yang terdiri dan 11 program, 21 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran, telah terealisasi pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TAHUN 2024		Persentase Capaian
			ANGGARAN	REALISASI	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata	4.102.843.800	3.614.699.646	88,10%
2		Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	68.095.000	68.095.000	100%

		dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	586.110.900	504.594.700	86,09%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	953.426.300	940.634.300	98,66%
5	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pengembang an Kebudayaan	2.121.344.764	2.094.622.723	98,74%
6	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pengembang an Kesenian Tradisional	228.765.000	225.515.000	98,58%
7	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	436.060.000	418.376.550	95,94%
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	742.569.278	676.559.879	91,11%
9	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembang an Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100%
10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Pengembang an Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.906.712.628	10.048.600.619	92,13%
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan inovasi Pelayanan Publik	Penunjang urusan pemerintah daerah	8.244.515.866	7.615.586.166	92,37%

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 26.607.283.583,- atau 92.42% dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.790.443.536,- . Efisiensi anggaran sebesar 7,58% dari anggaran yang ada yang berasal dari sisa pengadaan dan ada satu pekerjaan yang tidak terbayarkan yaitu Pembelian AC dengan kronologis ada surat dari pihak ketiga, setelah mereka stop opname

laporan keuangan ternyata ada satu kontrak yang belum masuk ke Rekening mereka yaitu pengadaan AC dan setelah dicroscek ke Rekening Daerah dan BJB tidak ada uang keluar sebesar itu Oleh karena itu dijadikan Hutang yang di catat di Neraca dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024.



BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2024 ini, dapat Kami simpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi secara umum melalui 4 (empat) Tujuan, 5 Sasaran Strategis dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut :

- Ada 5 Sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang terjabarkan kedalam & Indikator Kinerja Utama.
- *Sasaran Strategis 1* ada 3 indikator Kinerja , dengan capaian kinerja indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 477 kunjungan dari target 450 orang (106%). Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara melebihi target walaupun kalau dibandingkan capaian kinerja dengan tahun 2023 berkurang 1.314% itu dikarenakan pada Renja Perubahan target kunjungan wisatwan Manca Negara dinaikan yang asalnya 30 Kunjungan menjadi 450 kunjungan disesuaikan dengan capaian tahun 2023.
 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 170.184 Kunjungan dari target 158.000 Kunjungan (107%), Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara melebihi target walaupun kalau dibandingkan capaian kinerja dengan tahun 2023 berkurang 275,96% itu dikarenakan pada Renja Perubahan target kunjungan wisatawan Nusantara dinaikan yang asalnya 43.050 Kunjungan menjadi 158.000 kunjungan disesuaikan dengan capaian tahun 2023.
 3. Lama Kunjungan wisata 2 hari 1 malam dari target 2 hari 1 malam. (100%) sesuai dengan target.

- *Sasaran Strategi ke 2* memiliki 1 Indikator yaitu prosentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan capaian Kinerjanya 70% dari target Kinerja 64% atau sekitar 109% kenaikannya. Itu ditunjang dengan berbagai event yang diselenggarakan oleh Dina Kepemudaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga serta DKKC.
- *Sasaran ke 3* memiliki 1 indikator yaitu Prosentase Pemuda yang aktif didalam Pembangunan dengan capaian kinerjanya 11,61% dari target 9,01%, Capaian Kinerja Melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya kolaborasi data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengenai data Pemuda yang ikut berorganisasi Kemasyarakatan.
- *Sasaran ke 4* Memiliki 1 indikator yaitu Prosentase Masyarakat yang aktif berolahraga capaian kinerjanya adalah 47,60% dari target 47% atau 101,27%. Melebihi target sedikit. Dikarenakan Setiap Minggu selama tahun 2024 diadakan senam bersama yang bertempat di Pemkot Cimahi dan senam bersama yang dilakukan oleh KORMI
- *Sasaran ke 5* Memiliki 1 indikator yaitu Nilai RB dengan capaian 74,97 dari target 74,97 atau 100% sesuai dengan target .

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga jika dirata-ratakan mencapai 108.16% (Melebihi/melampaui target), dengan efisiensi anggaran sebesar 15,69%.

Penyerapan Anggaran pada tahun 2024 sebesar 92,42% yaitu Rp.26.607.283, dari anggaran yang tersedia 28.790.443.536 dengan sisa anggaran sebanyak 2.183.159.953. Efisiensi anggaran sebesar 7,58% dari anggaran yang ada yang berasal dari sisa pengadaan dan ada satu pekerjaan yang tidak terbayarkan yaitu Pembelian AC dengan kronologis ada surat dari pihak ketiga, setelah mereka stop opname laporan keuangan ternyata ada satu kontrak yang belum masuk ke Rekening mereka yaitu pengadaan AC dan setelah dicroscek ke Rekening Daerah dan BJB tidak ada uang keluar sebesar itu oleh karena itu dijadikan Hutang yang dicatat di Neraca dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 5 sasaran dan 7 indikator sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi semua mencapai target dengan dirata rata seluruh capaian Kinerja melampaui target/baik sekali dengan capaian 107,48%. Berbeda dengan tahun 2023 walaupun capaian kinerja keseluruhan mencapai 330,74% tapi ada

satu indikator yang tidak tercapai yaitu prosentase pemuda dalam pembangunan.

Rekomendasi Di tahun 2025 diusulkan ada perubahan target Kinerja untuk angka kunjungan wisatawan mancanegara, pemuda yang aktif dalam pembangunan, dan Nilai RB target disamakan dengan pencapaian tahun 2024.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

- Memperbanyak event sesuai dengan Program prioritas Walikota supaya jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat
- Pengembangan wisata ecco wisata Cimenteng
- Revitalisasi Stadion Sangkuriang, Gor Sangkuriang, Gor Padasuka, Lapangan Cibaligo dan Lapangan Poral.
- Pembelian tanah di Ecowisata Cimahi untuk lahan parkir dan memperluas lahan yang ada.
- Melakukan pembinaan pada atlet – atlet tingkat pelajar (pembentukan LPPD)
- Melakukan pagelaran seni serta kegiatan kepemudaan dan olahraga
- Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana atas asset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam pemanfaatannya.
- Pendataan untuk Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pada kesimpulan akhir laporan ini, dapat disampaikan bahwa pencapaian target indikator sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi secara keseluruhan pada Tahun 2024 telah dipenuhi sesuai dengan harapan dan kemampuan. Diharapkan capaian kinerja ditahun akan datang akan lebih baik lagi.

